

# STRATEGI PEMERINTAH MENINGKATKAN INVESTASI DI SEKTOR PERKEBUNAN

Nina Yuslaini

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

**Abstract: Increase Investment Strategy Plantation Sector.** This thesis aims to mengetahui extent of Riau Provincial Government Strategy to Increase Investment in Local Year 2010-2013 .. Increased investment in the form of Domestic Investment (DCI) and Foreign Direct Investment (FDI) of course positively correlated to economic growth in the region especially Riau Province but the absence of legal protection in the form of a firm and clear policy would be a problem in raising investment funds to the Province Riau a quantitative investment rate has increased. But there are other variables that wants to be seen as a single entity that can not be separated from investment work, namely the issue of institutional investment, the issue of policy or legal framework, the issue of tax certainty, the issue of licensing services and the issue of political stability. The obstacles to increased investment barriers low quality of human resources personnel, lack of budget, lack of coordination among institutions both horizontally and vertically as well as the lack of application of technology and information systems.

**Abstrak: Strategi Pemerintah Meningkatkan Investasi di Sektor Perkebunan.** Kajian ini bertujuan untuk mengetahui luasnya Strategi Pemerintah Provinsi Riau untuk Meningkatkan Investasi di Tahun lokal 2010-2013. Peningkatan investasi dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) tentu berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah ini terutama Provinsi Riau tetapi tidak adanya perlindungan hukum dalam bentuk kebijakan yang tegas dan jelas akan menjadi masalah dalam meningkatkan dana investasi ke Riau Province tingkat investasi kuantitatif telah meningkat. Tetapi ada variabel lain yang ingin dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kerja investasi, yaitu masalah investasi kelembagaan, isu kebijakan atau kerangka hukum, isu kepastian pajak, isu pelayanan perizinan dan isu stabilitas politik. Hambatan untuk meningkatkan hambatan investasi rendahnya kualitas personel sumber daya manusia, kurangnya anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga secara horisontal dan vertikal serta kurangnya penerapan teknologi dan sistem informasi.

**Kata Kunci:** strategi, investasi, promosi, sektor perkebunan

## PENDAHULUAN

Studi ini ingin melihat persoalan investasi dan promosi sektor perkebunan sebagai salah satu potensi investasi yang strategis dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai tujuan dari pelaksanaan pembangunan di Provinsi Riau. Sektor perkebunan masih menjadi primadona investasi di Provinsi Riau mengingat ketersediaan lahan dan pasar. Oleh sebab itu, studi ini fokus melihat investasi dan promosi sektor perkebunan sebagai variabel utama penggerak roda perekonomian masyarakat di Provinsi Riau.

Perkembangan sektor perkebunan mengalami peningkatan yang luar biasa pesat terutama perkebunan kelapa sawit. Sektor perkebunan kelapa sawit semakin menjadi andalan peningkatan perekonomian masyarakat dan pening-

katan kesejahteraan serta menjadi pengikat investasi daerah. Provinsi Riau dikenali dengan penghasil, masyarakat lebih menggemari sawit dibandingkan yang lain seperti kopi, kelapa, dan lain sebagainya. Selain itu, sawit merupakan bisnis yang sifatnya berumur panjang (hotikultuara) sehingga sawit sangat diminati sekali untuk berinvestasi jangka panjang. Sampai detik ini sawit menjadi pilihan masyarakat baik itu kalangan bawah sampai kalangan atas.

Llewellyn dan Tappin mengatakan bahwa strategi pada mulanya sering diperlakukan hanya sebagai “*Dormant document*” yang hanya sedikit memberi manfaat bagi organisasi, sekalipun dalam proses formulasinya memerlukan tenaga, biaya, dan waktu yang tidak sedikit banyak. Strategi lebih luas membahas tentang karakter hambatan, mulai dari teknis-administratif sampai

strategis-strategis idiologis yang menjadikan strategi seperti terkesan begitu sulit untuk memperoleh tempat yang terhormat pada pemerintahan, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari rumusan idiologis dan filosofis.

Berbagai batasan mengenai kebijakan publik diberikan oleh para ahli, meskipun tidak menyebutkan secara spesifik siapa pelaku kebijakan publik, kebijakan publik sering diberi batasan sebagai hasil-hasil keputusan (*decision*) yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik. Derbyshire mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik. Menurut Mooney koordinasi adalah susunan yang teratur (*orderly arrangement*) dari usaha kelompok (*group effort*), untuk menciptakan kesatuan tindakan (*unity of action*) dalam mengejar (*pursuit*) tujuan bersama (*common purpose*). Tujuan dari adanya koordinasi adalah untuk menjamin kesatuan tindakan, kesatuan usaha, keselarasan hubungan, penyesuaian, dan kesinambungan antar berbagai bagian organisasi, dalam pelaksanaan tugas guna mewujudkan tujuan organisasi.

Studi mengenai peningkatan investasi ini bukanlah studi pertama yang dilakukan oleh peneliti. Diyakini telah banyak hasil kajian mengenai peningkatan investasi salah satunya adalah yang dilakukan oleh Sarwedi Staf Pengajar Fakultas Ekonomi - Universitas Negeri Jember Direktur Pusat Pengkajian Ekonomi dan Sosial (PPES) Jember yang mengangkat kajian dengan judul *Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor Yang Mempengaruhinya*. Dalam studi ini Sarwedi melihat investasi asing dengan pendekatan kuantitatif yang memuat kesimpulan bahwa variabel ekonomi (GDP, Growth, Wage, dan Ekspor) mempunyai hubungan positif dengan FDI, sedangkan variabel non ekonomi yaitu stabilitas politik (SP) mempunyai hubungan negatif. Hal ini sejalan dengan hasil temuan empiris Schneider and Frey (1986) bahwa kestabilan politik mempunyai hubungan negatif dengan FDI.

Studi lainnya adalah yang dilakukan oleh Purwoko dkk dengan judul “Analisis Strategi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Menarik

Investor: studi kasus kabupaten tanggamus lampung. Dalam studi ini Purwoko dkk menghasilkan simpulan bahwa aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus memiliki persepsi yang sama dengan para investor dalam melihat tingkat kepentingan dari aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi, namun mereka memiliki persepsi yang berbeda dalam hal mengukur kinerja aparat Pemerintah Daerah dalam kaitannya untuk menyediakan aspek-aspek tersebut.

Studi lainnya mengenai strategi peningkatan investasi adalah yang dilakukan Khoiri (2010) dengan judul “*Strategi Peningkatan Iklim Investasi Daerah (Studi Penerapan Information and Communication Technology/ ICT di Pemerintahan Kabupaten Sragen)*”. Dalam studinya Khoiri melihat bahwa kondisi iklim investasi di Kabupaten Sragen cukup baik, dilihat dari keadaan ekonomi makro yang relatif stabil, situasi politik regulasi demikian kondusif serta keadaan sosial budaya masyarakat begitu ramah, dan penerapan ICT sudah cukup maju. Selain itu didukung oleh kelembagaan yang terstruktur dengan baik melalui Badan Perijinan Terpadu (BPT) dalam memberikan layanan terpadu dan sistem online. Kemudian berkaitan dengan dampak setelah menerapkan ICT, ternyata memberikan realisasi pemasukan investasi yang lebih baik dibandingkan dengan penerimaan investasi ketika sebelum menerapkan ICT. Meskipun memberikan peningkatan tidak begitu signifikan, akan tetapi dengan adanya ICT tersebut dapat mendorong pemasukan investasi di Kabupaten Sragen setiap tahunnya.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Provinsi Riau untuk Meningkatkan Investasi di Tahun 2010-2013.

## METODE

Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya (Nawawi, 1990). Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan

penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya (Arikunto, 1996). Metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat. Pelaksanaan penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (Moleong, 2000). Sementara Sugiyono (1998) mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak. Sesuai dengan fokus penelitian yaitu peran Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau, maka penelitian ini lebih memungkinkan apabila tingkat ekplanasi menggunakan penelitian deskriptif, dengan metode penelitian kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Strategi Peningkatan Investasi Sektor Perkebunan

Investasi adalah motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, sementara itu pembangunan di dalam era otonomi daerah sekarang ini, pada intinya adalah berupa pemberdayaan daerah. Dimana dalam hal ini daerah harus mampu mengatur, mengurus, dan mengelola kepentingan serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Selama ini seringkali terlihat, bahwa posisi tawar yang dimiliki daerah terasa kurang, baik itu terhadap pusat maupun terhadap pihak ketiga (dunia usaha). Karena itulah pemberdayaan daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Pemerintah daerah dan pengusaha adalah dua kelompok yang paling berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah, mempunyai kelebihan dalam satu hal, dan tentu saja keterbatasan dalam hal lain, demikian juga pengusaha. Sinergi antara

keduanya untuk merencanakan bagaimana ekonomi daerah akan diarahkan perlu menjadi pemahaman bersama. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan peluang, serta membentuk wawasan orang banyak. Pengusaha mempunyai kemampuan mengenali kebutuhan orang banyak dan dengan berbagai inisiatifnya, memenuhi kebutuhan itu. Aktivitas memenuhi kebutuhan itu membuat roda perekonomian berputar, menghasilkan gaji dan upah bagi pekerja dan pajak bagi pemerintah. Dengan pajak, pemerintah daerah berkesempatan membentuk kondisi agar perekonomian daerah berkembang lebih lanjut.

Pemerintah daerah dalam mempertahankan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerahnya agar membawa dampak yang menguntungkan bagi penduduk daerah perlu memahami bahwa manajemen pembangunan daerah dapat memberikan pengaruh yang baik guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang diharapkan. Bila kebijakan manajemen pembangunan tidak tepat sasaran maka akan mengakibatkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Maka manajemen pembangunan daerah mempunyai potensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah.

### *Penyebaran informasi*

Dalam rangka mengisi dan mewujudkan semangat Otonomi Daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah mengambil berbagai langkah dan inisiatif, termasuk diantaranya melakukan upaya-upaya promosi pengenalan potensi sumberdaya dan peluang usaha/investasi di Provinsi Riau, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam rangka menciptakan *image* positif serta meningkatkan apresiasi kalangan pengusaha maupun investor, dengan tujuan agar investor tertarik untuk bekerjasama dan menanamkan modalnya untuk menggerakkan roda pembangunan daerah yang memang membutuhkan biaya besar yang tidak dapat disediakan sepenuhnya oleh pemerintah.

### ***Fasilitasi calon investor***

Selanjutnya dalam rangka fasilitasi calon investor dan membangun kerjasama dengan stakeholder terkait dengan investasi, BPMPD Provinsi Riau melakukan sosialisasi kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan investasi. Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai kepastian keamanan dan ketertiban kepada calon investor dan memberikan pemahaman kepada *stakeholder* terkait tentang pentingnya investasi dan kerjasama dengan segenap stakeholder dalam menjaga kantibmas serta kepastian *government tax*.

### ***Membina pelaksanaan penanaman modal***

Selanjutnya sesuai dengan amanat yang tertuang pada Rencana Strategis Penanaman Modal Provinsi Riau 2009-2013 yang telah ditetapkan maka untuk melakukan evaluasi keberhasilan dan pencapaian program kerja perlu dilaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi-evaluasi. Upaya tersebut sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan, bila terjadi gejala penyimpangan kegiatan dapat dideteksi secara lebih dini dan upaya perbaikan dan penyempurnaan dapat segera dilakukan sehingga penyimpangan yang lebih besar dapat dihindari. Sebaliknya apabila dikehendaki adanya perubahan kegiatan serta peningkatan penajaman sasaran kegiatan sesuai perkembangan kondisi yang terjadi atau terkait dengan kebijakan baru pemerintah maka kegiatan monitoring akan sangat menunjang upaya untuk mengatasi kendala yang muncul.

### ***Meningkatkan kualitas dan akurasi informasi***

Dalam upaya mengoptimalkan keseragaman data investasi sebagai salah satu bahan pendukung upaya penyebarluasan informasi daerah, maka Pemerintah Provinsi Riau menyelenggarakan Kegiatan Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDN/PMA se Provinsi Riau Tahun 2013 sebagai wujud peningkatan kualitas dan akurasi informasi potensi dan peluang investasi. Kegiatan Sinkronisasi tersebut juga dimaksudkan untuk menghimpun dan mensinkronkan Data Investasi PMDN/PMA antara

BKPM, BPMPD Provinsi Riau, dan Perangkat Daerah Penanaman Modal Kabupaten/Kota (PDPMK) se-Provinsi Riau.

### ***Meningkatkan upaya pengembangan promosi***

Dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, setiap aparatur pemerintah bertugas melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang masing-masing. Dengan demikian, tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh pemerintah selalu menyangkut kegiatan-kegiatan atau tugas lebih dari satu aparatur pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, kegiatan aparatur pemerintah perlu disatukan dan diselaraskan untuk mencegah timbulnya tumpang tindih dan kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya, dengan demikian koordinasi antar kegiatan aparatur pemerintah harus dilakukan.

### ***Meningkatkan kualitas perencanaan, administrasi dan kepegawaian***

Peningkatan investasi tidak akan berjalan optimal apabila tidak disertai dengan peningkatan kualitas perencanaan, penataan administrasi dan kualitas pegawai sebagai roda penggerak promosi potensi daerah. Maka dalam rangka peningkatan kualitas itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan bimbingan dan penyuluhan pelaksanaan penanaman modal. Kegiatan ini memiliki sasaran strategis yaitu PMA dan PMDN serta pegawai itu sendiri.

### ***Kendala dalam Peningkatan Investasi Sektor Perkebunan***

#### ***Keterbatasan infrastruktur***

Keterbatasan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, air bersih merupakan masalah mendasar yang dihadapi oleh Provinsi Riau dalam upaya mendatangkan investasi. Seperti diketahui bahwa sarana jalan yang ada di Provinsi Riau belum memadai untuk dilakukannya kluster industri. Pemerintah Provinsi Riau dahulunya pernah mengajukan rancangan peraturan daerah untuk pembentukan jalan khusus industri, akan tetapi Ranperda itu mentah karena banyaknya penolakan dari pengusaha.

### **Kendala RTRW**

Rencana tata ruang wilayah menjadi kendala utama dalam pengembangan investasi di sektor perkebunan. Sampai saat ini, rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau belum juga menemui kejelasan sehingga berdampak pada ketidakjelasan wilayah untuk kegiatan pengembangan sektor perkebunan dan sektor-sektor lainnya. Selain itu, dengan dilakukannya moratorium penebangan hutan menyebabkan investasi untuk pengembangan lahan baru perkebunan menjadi terhenti.

### **Konflik lahan**

Selain masalah RTRW, pengembangan investasi di sektor perkebunan dihadapkan pada kendala yang tidak kalah pelik yakni konflik lahan dengan masyarakat. Hampir disemua kegiatan pengembangan perkebunan baru mengalami kondisi konflik lahan ini. Bahkan pada beberapa kasus sampai menimbulkan korban dan pengrusakan terhadap sarana perkebunan. Konflik lahan ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung usai sehingga berdampak pada menurunnya indeks kepercayaan investasi khususnya dalam penyelesaian konflik lahan.

### **Pelayanan perizinan**

Salah satu kendala klasik dan mengakar adalah persoalan pelayanan perizinan. Lazim diketahui bahwa pelayanan perizinan menjadi persoalan mendasar, krusial dan pelik yang dihadapi oleh para investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Riau. Terobosan dengan melakukan pelayanan perizinan satu atap nyatanya belum mampu menerabas proses perizinan yang begitu panjang dan berbelit. Selain masalah perizinan di daerah nyatanya di tingkat pusat juga demikian terlebih jika investasi itu mesti mendapat persetujuan dari pemerintah pusat seperti pengembangan perkebunan baru dimana untuk pembukaan maupun alih fungsi lahan perkebunan dalam skala tertentu mesti mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

### **SIMPULAN**

Kegiatan investasi di Provinsi Riau mengalami kenaikan atau peningkatan yang cukup sig-

nifikan termasuk kegiatan investasi di sektor perkebunan. Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi investasi dengan pemerintah kabupaten/kota, melakukan pembinaan aparatur guna mendukung kesiapan investasi, mensosialisasikan kebijakan dan peraturan guna memberikan kepastian hukum dan kepastian pajak, pemutakhiran data investasi, penyebarluasan potensi investasi melalui media internet, promosi potensi secara kontiniu, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengawasan dan evaluasi yang terus menerus. Dari data investasi diketahui bahwa sektor perkebunan menempati posisi ketiga di bawah industri kertas dan industri listrik/air. Dalam upaya meningkatkan investasi di daerah, Pemerintah Provinsi Riau dihadapkan pada kendala-kendala keterbatasan sarana infrastruktur, kendala rencana tata ruang wilayah, kendala konflik lahan dengan masyarakat serta masalah perizinan yang masih belum tuntas dalam melakukan reformasi bidang perizinan.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Hariyoso Sumoprawiro. 2002. *Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Peradaban
- Husnan. 1996. *Penanaman Modal Investasi*. 1996. Jakarta: Bumi Aksara
- Inu Kencana Syafiie, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Joesoef, Daoed. 2014. *Studi Strategi Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kompas
- Josef Riwu Kaho, 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Llewellyn, Sue, Emma Tappin. 2013. *Strategi in the public Sector: Mangement in the Wilderness*. Jakarta: Erlangga
- Lexy J. Moeleong, 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Manullang. 1991. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI: Yogyakarta
- Malayu S.P. Hasibuan. 1994. *Manajemen*

- Sumber Daya Manusia*. Jakarta: CV. Haji Masagung
- M Irfan Islamy. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Riant Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Ryaas Rasyid. 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya
- Samodra Wibawa, 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia
- Solichin Abdul Wahab. 2001. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekarno K, 1975. *Dasar-Dasar Management*. Medan: Telaga Bening
- Sugiyono, 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Alfabeta: Bandung.
- Sunariyah. 2003. *Strategi investasi di Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Winardi. 2007. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zainal Abidin. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.